

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu program pendidikan nonformal untuk meningkatkan kemampuan masyarakat agar dapat lebih berkembang melalui suatu peningkatan keterampilan yang dimiliki atau ada (Sucipto dan Sutarto, 2015: 136). Pemberdayaan masyarakat mempunyai tujuan untuk peningkatan keterampilan serta bertujuan untuk tempat masyarakat mendapatkan pendapatan yang sesuai dengan keterampilan tersebut.

Pemberdayaan dilaksanakan dalam bentuk peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat yang mencakup kesejahteraan keluarga, masyarakat miskin, meninggikan harkat juga martabat masyarakat bawah, membentuk masyarakat sebagai subjek dalam bertindak. Bentuk peningkatan kualitas kesejahteraan dapat menjadikan masyarakat mempunyai tujuan sehingga apa yang mereka inginkan tercapai sebagai masyarakat yang sejahtera.

Untuk mencapai tujuan tersebut, pemberdayaan dapat dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah daerah; Namun, agar Kota Banjarmasin dapat membantu kesejahteraan keluarga dan masyarakat di sana, program pemberdayaan harus dilaksanakan. Pendampingan dan pelatihan dapat digunakan untuk menciptakan lapangan kerja sebagai bagian dari program pemberdayaan. Untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat dalam hal ini, diperlukan pembinaan-pembinaan dan pengarahan oleh instansi pemerintah dan organisasi terkait.

Kesejahteraan serta kebahagiaan di dunia serta akhirat ialah salah satu perintah yang di anjurkan dalam islam dengan metode bekerja serta berupaya. Banyak tipe usaha ataupun pekerjaan yang dapat di jalani oleh manusia baik secara orang ataupun secara kelompok, dengan tidak melanggar seluruh ketentuan syariat Islam supaya memperoleh keberkahan dalam hidup dunia serta akhirat. Bekerja dan berusaha harus dilandasi dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan juga perilaku profesional yang dibenarkan oleh Allah SWT sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadits (Adiwarman A Karim, 2014:45).

Dari kutipan diatas dapat dipahami bahwa untuk mendapatkan kesejahteraan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat manusia dapat menjalankan perintah yang dianjurkan dalam islam sebagaimana dalam ketentuan Syariat islam untuk memperoleh keberkahan serta kedamaian didunia serta akhirat. Sebagaimana firman Allah SWT Q.S A'raf: 10:

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ ۗ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ

Artinya: “Kami telah menjadikan untukmu semua didalam bumi itu sebagai lapangan mengusahakan kehidupan (bekerja), tetapi sedikit sekali diantaramu yang bersyukur”. Adapun hadits yang menganjurkan umat Islam untuk bekerja adalah: “Tidak ada seseorang yang memakan satu makananpun yang lebih baik dari makanan hasil usaha tangannya (bekerja) sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Allah Daud as memakan makanan dari hasil usahanya sendiri” (Hadits Riwayat Bukhari).

Di Indonesia terdapat satu jenis usaha yang berkembang dalam masyarakat yaitu UMKM, dimana UMKM merupakan kegiatan bisnis yang bergerak pada

bidang usaha tertentu. UMKM diketahui sebagai usaha yang mampu mengatasi pengangguran dan kemiskinan. Di dalam agama islam pengangguran dan kemiskinan harus diberhentikan. UMKM ialah suatu kegiatan ekonomi yang banyak dilakukan oleh masyarakat dan terbukti mampu bertahan dalam krisis ekonomi yang pernah terjadi di Indonesia (Teuku Syarif, 2008:35). Dengan membangun usaha dalam kegiatan berbisnis, UMKM dapat memberikan pengaruh yang sangat besar dalam kemajuan ketidak berdayaan orang- orang yang lemah.

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tidak hanya mampu mengatasi kemiskinan dan pengangguran, tetapi juga mampu mengangkat masyarakat dari keterpurukan. Masyarakat dapat mencari peluang sehingga mampu meningkatkan taraf hidup mereka dan kehidupan untuk diri sendiri serta keluarganya berkat adanya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Dalam bukunya *Menggerakkan Sektor Riil UKM & Industri* (2009), Ina Primiana juga memandang UKM sebagai tumpuan pembangunan daerah untuk mempercepat pemulihan ekonomi guna memberikan program prioritas dan pertumbuhan berbagai sektor dan potensi. Selain itu, meskipun terjadi peningkatan jumlah usaha kecil, baik dari segi jumlah usaha maupun jumlah lapangan kerja yang tercipta, usaha kecil memiliki peran yang signifikan dalam perekonomian Indonesia.

Dengan bukti bahwa UMKM banyak ditemukan sebagai kegiatan usaha produktif, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Selatan, khususnya di Banjarmasin, mengoperasikan sektor informal yang mampu mendorong kegiatan pembangunan ekonomi. UMKM berperan penting dalam mengurangi pengangguran di Banjarmasin karena keberadaannya dapat membuka

lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan UMKM lebih dari sekadar perolehan keterampilan yang diperlukan dalam ekonomi Islam; Hal ini juga bertujuan untuk memudahkan para pelaku UMKM mengembangkan kegiatan ekonomi dan mengajarkan pemilik usaha bagaimana menggunakan prinsip-prinsip terbaik untuk membangun dan mengembangkan usahanya.

Oleh karena itu, Pemerintah Daerah perlu berupaya memberikan kekuatan lebih kepada para pelaku UMKM untuk mendongkrak kinerjanya. Hal ini akan memungkinkan para pelaku UMKM menghasilkan produk yang berdaya saing tinggi agar dapat bersaing di pasar global dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian secara mendalam. Karena dalam hal ini menjadi dasar ketertarikan penulis dalam mengangkat judul tersebut. Sehingga pembahasan ini penulis tuangkan dalam sebuah penelitian yang berjudul. “PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEKERJA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (Studi kasus pada Dinas Koperasi Dan UMKM Kota Banjarmasin)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemberdayaan pelaku UMKM oleh Dinas Koperasi, UMKM Kota Banjarmasin?

2. Bagaimana analisis dalam Prespektif ekonomi Islam terhadap pemberdayaan masyarakat pada Dinas Koperasi Dan UMKM Kota Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk

1. Untuk mengetahui pemberdayaan pelaku UMKM oleh Dinas Koperasi, UMKM pada Dinas Koperasi, UMKM Kota Banjarmasin?
2. Untuk mengetahui analisis dalam prespektif ekonomi islam terhadap pemberdayaan pelaku UMKM pada Dinas Koperasi Dan UMKM Kota Banjarmasin?

D. Kegunaan Penelitian

Temuan penelitian ini diharapkan dapat memperkaya penelitian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang dilakukan peneliti di Dinas Koperasi Kota Banjarmasin sehingga mampu memberikan wawasan baru bagi bidang pendidikan. Selain itu, penelitian ini dapat membantu para sarjana dan penulis ekonomi Islam khususnya dalam memahami masalah ketimpangan dan ketidakmeratanya pendapatan di Indonesia.

E. Definisi Operasional

Tujuan dari definisi operasional adalah untuk menghindari kesalahpahaman dan perbedaan interpretasi dari istilah-istilah judul skripsi. Sesuai dengan judul penelitian yaitu: “Perspektif Ekonomi Islam Dalam Pemberdayaan Masyarakat

Pekerja Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Studi Kasus Pada Dinas Koperasi Dan UMKM Kota Banjarmasin)” maka devinisi operasional yang perlu dijelaskan yaitu:

1. Pengertian pemberdayaan menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Kecil, Mikro dan Menengah pasal 1 ayat 8 menyatakan pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga dunia usaha dan masyarakat dalam pertumbuhan iklim usaha pembinaan, dan pengembangan sehingga usaha kecil mampu menumbuhkan dan memperkuat dirinya menjadi usaha yang tangguh serta mandiri. (Hesti Kusuma Wardai Ambar Pertiwi, 2012)
2. Usaha Kecil Menengah adalah dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, kecil, dan Menengah dinyatakan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/ atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang- Undang. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil. (Undang-Undang Nomor 9 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, 2008).
3. Dinas Koperasi dan usaha mikro, Kecil , Menengah (UMKM) Kalimantan Selatan (Kalsel) adalah Dinas yang menaungi lembaga Koperasi dan pelaku-pelaku UMKM yang ada di kalsel. Berdasarkan peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Rancangan

Struktur Organisasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Selatan PP-18/2016 Fungsi dan Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di Bidang Perkoperasian, Usaha Kecil dan Menengah sesuai dengan Azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tuas pembantuan. (Mariani, 2023)

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya tentang program pemberdayaan masyarakat pedesaan telah mencakup berbagai topik yang berbeda dari penelitian yang sedang dilakukan saat ini. Dengan demikian, ditemukan permasalahan penelitian penelitian ini terkait dengan beberapa penelitian sebelumnya, antara lain:

1. “Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Industri Kerajinan Patung Batu di Desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta,” demikian judul skripsi Riyanto. Temuan penelitian ini menunjukkan munculnya industri patung batu di Dusun Lemahdadi Desa Bangunjiwo. Industri ini diprakarsai oleh masyarakat secara keseluruhan dan tidak melibatkan pihak luar manapun. Masyarakat desa Bangunjiwo berubah dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industrialis seiring berjalannya waktu. Pada awalnya, masyarakat adalah agraris. Masyarakat kini telah mencapai tingkat proses tahapan pemberdayaan masyarakat, yaitu sebagai berikut: tahap kesadaran, tahap transformasi, dan tahap membangun kapasitas intelektual sehingga

bermanfaat bagi anggota masyarakat dan pihak-pihak yang terkait dengannya. pemerintah).

Dalam proses tahapan pemberdayaan masyarakat melalui usaha industri kerajinan patung batu para pengrajin mengalami beberapa kendala, antara lain: kurangnya peran serta pemerintah daerah, pengadaan bahan baku dan modal. Munculnya industri kerajinan patung batu juga membawa dampak positif yaitu meningkatkan pendapatan masyarakat dan membantu program pemerintah dalam mengurangi jumlah kemiskinan dan mengurangi tingkat pengangguran. (Riyanto, 2018, p. 14) Kesamaan ditemukan dalam pembahasan program pemberdayaan masyarakat desa dalam penelitian Riyanto. Selain itu, terdapat perbedaan: penelitian Riyanto menitik beratkan pada peran program pemberdayaan masyarakat pedesaan dalam upaya meningkatkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai serta masyarakat Desa Bayan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara. Sebaliknya, dalam hal ini penelitian berfokus pada peran program pemberdayaan masyarakat pedesaan dalam meningkatkan UMKM.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Wildan Arif Hidayatullah dalam tesisnya yang berjudul “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa dalam Memenuhi Aspek Maqashid Syariah melalui Pendekatan Asset Based Community Development (Studi pada Desa Wisata Pujon Kidul Kabupaten Malang Jawa Timur”. Temuan penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa tahapan proses pemberdayaan masyarakat desa dalam bidang ekonomi seperti tahapan mengumpulkan cerita, pengorganisasian kelompok inti, pemetaan asset, merumuskan visi dan rencana, menggerakkan asset,

memanfaatkan sumber daya dari luar, hingga menghasilkan suatu pemberdayaan yang baik. (Hidayatullah, 2019, p. 13)

Dalam penelitian Wildan Arif Hidayatullah, pembahasan program pemberdayaan masyarakat desa memiliki kesamaan. Selain itu juga terdapat perbedaan. Kajian Wildan Arif Hidayatullah misalnya terfokus pada isu program pemberdayaan masyarakat desa yang lebih terbatas pada sektor ekonomi. Sebaliknya, penelitian ini berfokus pada peran program pemberdayaan masyarakat desa dalam meningkatkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dan peserta penelitian adalah masyarakat Banjarmasin Kalimantan Selatan.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Firna Dianti dan Nahar Effendi dengan judul artikelnya “Analisis Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Sri Tanjung Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis”. Adapun hasil penelitian tersebut bahwa (a) berdasarkan keempat indikator dikatakan cukup baik karena pemerintah desa sudah melaksanakan bina lembaga dan bina usaha dan kepala desa perlu melakukan peningkatan pemberdayaan masyarakat yang lebih mengarah kepada pemberdayaan komunitas agar memiliki akses terhadap individu untuk mengembangkan bakat dan kemampuannya yang terpendam dalam rangka pendayagunaan sumberdaya secara berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, (b) faktor pendukung pemberdayaan masyarakat pada Desa Sri Tanjung Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis yaitu adanya pelaksanaan bina lembaga dan bina usaha, dan (c) faktor penghambat pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pada Desa Sri Tanjung Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis

yaitu bina lingkungan dan bina manusia. Sebaiknya Kepala Desa perlu melakukan pengembangan sumber daya manusia dalam pemberdayaan masyarakat supaya memiliki kemampuan dan keterampilan dengan cara mengadakan pelatihan maupun penyuluhan yang bekerja sama dengan UPTD kecamatan. (Effendi, 2022, pp. 319,332)

Peneliti menemukan kesamaan pembahasan pemberdayaan masyarakat desa antara penelitian Firna Dianti dan Nahar Effendi. pengembangan usaha di Desa Sri Tajung Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis dengan fokus pada kualitas sumber daya manusia, kajian ini mengkaji peran program pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan yang menjadi objek ialah Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan ini berisi uraian singkat tentang isi bab demi bab yang akan ditulis dalam penelitian ini.

1. Bab I adalah pendahuluan

Pada bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, definisi, dan tujuan penelitian yang ditetapkan semuanya tercakup dalam bab ini. Untuk menghindari penafsiran yang berbeda dari penulis, beberapa definisi operasional dalam judul penelitian harus dipahami. Selain itu, sistematika pembahasan dan kajian literatur dari penelitian sebelumnya harus dijadikan sebagai bahan referensi untuk memudahkan penelitian dan menjamin keasliannya.

2. Bab II merupakan landasan teori

Pada bab ini dapat memberikan informasi mengenai beberapa teori yang berkaitan dengan bahasan penelitian, yakni teori tentang pemberdayaan pelaku UKM pada Dinas Koperasi, teori tentang analisis dalam perspektif ekonomi Islam terhadap pemberdayaan pelaku UKM pada Dinas Koperasi Dan UMKM, serta pertumbuhan dan perkembangan pelaku UMKM.

3. Bab III adalah metode penelitian

Pada bab ini dapat memberikan informasi secara deskriptif sehingga dapat mengetahui metodologi penelitian, variabel, dan metode analisis.

4. Bab IV merupakan penyajian data dan analisis

Pada bab ini dapat memberikan hasil penelitian yang sudah dilakukan berupa pemberdayaan pelaku UMKM, serta analisis pemberdayaan pelaku UMKM dalam perspektif ekonomi Islam.

5. Bab V merupakan penutup

Dalam bab ini dapat memberikan kesimpulan, dan saran atas dasar penelitian.